



**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KESEHATAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RIAT EL KHAIR
2. Jabatan : DIREKTUR LAYANAN OPERASIONAL
3. NHK : 930050

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/120 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 571.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 378.000.000
2. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 828.963.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 4.999.963.000



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.999.963.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.